

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkitan Tiongkok (*the rise of China*) merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian internasional. Perkembangan pesat Tiongkok dalam berbagai aspek dipandang sebagai suatu potensi munculnya kekuatan baru yang akan mampu mendominasi di kawasan Asia ataupun mampu maju sebagai negara adidaya baru dan merubah sistem internasional yang unipolar pasca perang dingin. Menurut Bank Dunia, Tiongkok mengalami pertumbuhan PDB rata-rata 10% per tahun sejak tahun 1979 hingga 2017 yang menjadikannya kekuatan baru dalam aspek ekonomi.¹

Melalui peningkatan ekonomi tersebut Tiongkok menaikkan anggaran belanja pertahanan dan melakukan modernisasi militer. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 anggaran belanja militer Tiongkok naik dengan rata-rata 9.5% setiap tahunnya², dan membawa Tiongkok menempati posisi ketiga di dalam peringkat kekuatan militer dunia yang dikeluarkan oleh *Global Firepower* pada tahun 2016.³ Selain peningkatan dalam hal ekonomi dan pertahanan, Tiongkok yang sebelumnya cenderung bersikap pasif berubah menjadi bersikap partisipatif dan proaktif terhadap dinamika dan isu internasional. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Tiongkok di dalam *Six-Party Talks*, pembentukan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang melibatkan Rusia dan

¹ Wayne M. Morrison, "China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States," *Congressional Research Service*, Februari, (2018) : hlm 1

² Ian E. Rinehart, dan David Gitter, "The Chinese Military: Overview and Issues for Congress," *Congressional Research Service*, (2015): hlm 1

³ Global Firepower, China Military Strength, http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china (diakses 30 Agustus, 2016)

empat negara Asia Tengah, bahkan pembentukan dan intensifikasi perjanjian kawasan perdagangan bebas yaitu *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*.⁴

Posisi Tiongkok di Kawasan Asia ini diperkuat seiring dengan naiknya Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok pada tahun 2012 dengan mengusung slogan *Chinese Dream* pada kampanyenya.⁵ *Chinese Dream* merupakan arah kebijakan luar negeri Tiongkok yang bertujuan untuk memperbaharui Tiongkok dan mengembalikannya kepada masa kejayaannya di masa lalu sebagai negara yang berpengaruh di Asia.⁶ Hal ini diperkuat dengan pidato Xi Jinping yang menyebutkan bahwa Tiongkok harus mulai menerapkan diplomasi *great power* berdasarkan kearifan China (*you zhongguo tese de xinxing daguo waijiao*).⁷ Diplomasi tersebut memiliki empat karakteristik utama, yaitu: (1) membentuk model hubungan internasional baru dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan (*gongying wei hexin de xinxing guoji guanxi*); (2) membangun jaringan global yang bersifat kemitraan (*quanqiu huoban guanxi wangluo*); (3) mewujudkan Mimpi Asia Pasifik (*yatai meng*); dan (4) mewujudkan visi Keamanan Asia (*yazhou anquanguan*). Berdasarkan hal tersebut Tiongkok tidak hanya memiliki *power* yang memadai untuk menjadi negara yang mendominasi di Asia, namun juga mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk mencapai posisi tersebut.

⁴ Daniel Mockli, "The Rise of China: Regional and Global Power Shifts," *CSS Analyses in Security Policy* 2, No.8, (2007): hlm 2

⁵ Camilla T. N. Sorensen, "The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei," *Journal of China and International Relations* 3, No.1, (2015): hlm.55

⁶ Christopher K. Johnson, *Decoding China's "Emerging Great Power" Strategy in Asia*, (Maryland: Rowman & Littlefield, 2014), hlm. 18

⁷ Angela Poh & Mingjiang Li, "A China in Transition: The Rhetoric and Substance of Chinese Foreign Policy under Xi Jinping," *Asian Security*, (2017): hlm. 2

Dalam upaya mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya *regional power* di Asia, keberadaan Amerika Serikat menjadi salah satu tantangan bagi Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan berbagai negara di Asia, seperti aliansi militer dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan, yang dipandang oleh Tiongkok akan digunakan oleh Amerika Serikat sebagai pembendung Tiongkok dalam upaya perluasan pengaruhnya.⁸ Berdasarkan keadaan tersebut Tiongkok berupaya untuk meminimalisir pengaruh Amerika Serikat di Asia, salah satunya dengan melakukan intensifikasi hubungan bilateral dengan berbagai negara-negara di Asia agar mulai memihak Tiongkok.⁹ Korea Selatan menjadi negara target utama yang diinginkan untuk menjadi mitra Tiongkok di dalam kawasan. Posisi Korea Selatan ini menjadi penting bagi Tiongkok didasarkan atas dua alasan, yaitu untuk menarik Korea Selatan dari Amerika Serikat, dan menjadikan Korea Selatan sebagai mitra pengganti atas tidak lagi relevannya hubungan kemitraan Tiongkok dengan Korea Utara.¹⁰

Hubungan bilateral Korea Selatan dan Tiongkok sudah dibentuk sejak tahun 1992, namun interaksi yang berlangsung diantara keduanya tergolong stagnan, terutama pada tahun 2010 saat Tiongkok tidak memberikan pernyataan apapun terkait terjadinya penyerangan kapal militer milik Korea Selatan oleh Korea Utara.¹¹ Hubungan kedua negara mulai dinamis sejak tahun 2013, bersamaan dengan naiknya

⁸ Kevin Rudd, *U.S-China 21: The Future of U.S.-China Relations Under Xi Jinping* (United States of America: Belfer Center for Science and International Affairs, 2015), hlm. 11

⁹ Daniel Mockli, hlm.2

¹⁰ Ellen Kim. "Common Misconceptions About the China-South Korea Relationship," *Georgetown Journal of Asian Affairs*, (fall/2014): hlm.135

¹¹ Jaeho Hwang, *The ROK's China Policy Under Park Geunhye: A New Model of ROK-PRC Relations*, (Washington D.C.: The Brookings Institution, 2013), hlm.3

Presiden Park Geunhye sebagai presiden Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan beberapa hal seperti: negara pertama yang mengirimkan ucapan selamat atas pengangkatan Presiden Park Geunhye adalah Tiongkok; Korea Selatan menolak permintaan Jepang untuk mengadili Liu Qiang yang merupakan tersangka upaya pembakaran Kuil Yasukuni, kuil penghormatan atas pejuang yang tewas saat Perang Dunia kedua, dan mengembalikan tersangka tersebut ke Tiongkok; kunjungan Presiden Park Geunhye pada tahun 2013 yang menghasilkan pernyataan bersama antara Korea Selatan dengan Tiongkok untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam kemitraan kerjasama strategis; dan lain-lainnya.¹² Akan tetapi perkembangan tersebut tidak bisa berlanjut karena pada akhirnya muncul friksi dalam hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan.

Friksi yang timbul pada hubungan Tiongkok dan Korea Selatan bersumber dari permasalahan proliferasi dan agresivitas nuklir Korea Utara. Sejak percobaan peluncuran pertama pada tahun 2006, Korea Utara telah menunjukkan perkembangan pesat atas pembangunan senjata nuklirnya.¹³ Hal tersebut ditunjukkan melalui empat kali percobaan peluncuran misil dan pengumuman keberhasilan produksi bom hidrogen.¹⁴ Hingga tahun 2017, proliferasi nuklir Korea Utara diprediksi sudah mencapai tahap dimana negara ini sudah mampu mengembangkan dan mengonstruksi *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM).¹⁵ Sebagai negara yang

¹² Jaeho Hwang, hlm.1- 4

¹³ Mary Beth Nikitin, "North Korea's Nuclear Weapons: Technical Issues," *Congressional Research Service*, (2013): hlm 15

¹⁴ Emma Chanlett-Avery, Ian E. Rinehart, dan Mary Beth D. Nikitin, "North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation," *Congressional Research Service*, (2016): hlm 2

¹⁵ Shannon N. Kille, dan Hans M. Kristensen, "Trends In World Nuclear Forces, 2017," *SIPRI Fact Sheet*, Juli, (2017): hlm. 7

berbatasan langsung dengan Korea Utara, perkembangan senjata nuklir tersebut memberikan efek yang signifikan kepada Korea Selatan.¹⁶ Ketakutan Korea Selatan ini menjadi nyata dengan dikeluarkannya pernyataan bahwa Korea Utara akan melakukan penyerangan dan pembebasan wilayah Korea Selatan bersamaan dengan percobaan bom hidrogen yang dilaksanakan pada Januari 2016.¹⁷ Melihat ancaman yang semakin meningkat dari sebelumnya ini, maka Korea Selatan mengeluarkan respon melalui peningkatan keamanan dan pertahanan negaranya.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Juli 2016 Korea Selatan resmi memutuskan untuk membangun sistem pertahanan misil/*ballistic missile defence system* (BMDS) sebagai upaya mengantisipasi serangan Korea Utara. Korea Selatan yang tidak memiliki fasilitas senjata nuklir membangun sistem ini dengan menggandeng Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi payung Korea Selatan dalam hal pertahanan misil (*U.S nuclear umbrella*)¹⁸. Sistem anti misil yang dibangun merupakan sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) yang dirakit oleh perusahaan produsen senjata dan alat pertahanan Amerika Serikat, *Lockheed Martin*.¹⁹ THAAD akan melindungi teritori Korea Selatan dengan menghancurkan misil jarak pendek hingga menengah yang datang di atmosfer maupun diluar

¹⁶ Republic of Korea Ministry of National Defense, *2016 Defense White Paper*, (Seoul: Republic of Korea Ministry of National Defense, 2016), hlm.8

¹⁷ JH Ahn, "N. Korea Threatens to 'Liberate' S. Korea Strike U.S. Mainland," *NK News*, 7 Maret, 2016, <http://www.nknews.org/2016/03/n-korea-threatens-to-liberate-s-korea-strike-u-s-mainland/> (diakses 25 September, 2016)

¹⁸ *Nuclear Umbrella* merupakan salah satu wujud dari aliansi yang dijalin Korea Selatan dengan Amerika Serikat, sesuai dengan perjanjian *Mutual Defense Treaty* 1953 bahwa kedua negara akan saling bekerjasama dalam menghadapi ancaman serangan bersenjata eksternal. Mark E. Manyin, et.al, "U.S.-South Korea Relations," *Congressional Research Service*, Mei, (2017): hlm.18

¹⁹ Mark E. Manyin, et.al, "U.S. – South Korea Relations," *Congressional Research Service* (2016): hlm.4

atmosfir.²⁰ Sistem ini bekerja dengan *hit-to-kill technology*, yaitu kemampuan untuk menghancurkan misil dengan energi kinetik dimana sistem THAAD akan menembakkan misil kearah misil yang datang dan meledakkannya di udara.²¹ Bersama dengan pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan bertugas di Korea Selatan (*United States Forces Korea*), pelaksanaan proses pembangunan sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak akhir Februari 2017 di Distrik Seongju.²²

Akan tetapi, Tiongkok ternyata tidak menyambut baik kebijakan pertahanan Korea Selatan tersebut. Hal tersebut tercermin dari penyampaian Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, setelah Korea Selatan resmi mengumumkan keputusannya tersebut. Menurutnya keberadaan sistem THAAD merupakan sesuatu yang melebihi kebutuhan pertahanan Korea Selatan, sehingga akan berpotensi menimbulkan perlombaan senjata²³ antar negara-negara di sekitar Korea Selatan.²⁴ Lebih lanjut, Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan kekecewaannya atas pilihan Korea Selatan yang tidak mempertimbangkan keamanan Tiongkok dan berpotensi merusak hubungan bilateral antar kedua negara.²⁵

²⁰ Bruce Klingner, "South Korea Needs THAAD Missile Defense," *Backgrounder*, No.3024 (2015): hlm. 4-5

²¹ BBC News, "US South Korea Agree THAAD Missile Defence Deployment," *BBC News*, 8 Juli, 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-36742751> (diakses 22 Agustus, 2016)

²² James Pearson, dan Jumin Park, "U.S. Starts Deploying Anti-Missile System in South Korea After Defiant North's Latest Test," *Reuters*, 7 Maret, 2017, <http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-kcna/u-s-starts-deploying-anti-missile-system-in-south-korea-after-defiant-norths-latest-test-idUSKBN16D2MC> (diakses 13 September, 2017)

²³ Perlombaan senjata adalah kompetisi kemampuan militer dan pertahanan antara dua atau lebih negara. Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: the Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hlm. 8

²⁴ Michael Swaine, "China Views on South Korea's Deployment of THAAD," *China Leadership Monitor*, No.52 (2017): hlm. 3

²⁵ Shannon Tiezzi, "China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an instant'," *The Diplomat*, 25 Februari, 2016, <http://thediplomat.com/2016/02/china-warns-thaad-deployment-could-destroy-south-korea-ties-in-an-instant/> (diakses 30 Agustus, 2016)

Tiongkok memiliki beberapa alasan yang mendasari diambilnya sikap kontra terhadap penempatan sistem ini.²⁶ Alasan pertama adalah bahwa keberadaan sistem THAAD akan menjadikan keamanan di Semenanjung Korea tidak stabil karena menyebabkan munculnya perlombaan senjata regional. Kedua, THAAD merupakan bagian dari sistem pertahanan nuklir, yang berarti penempatannya akan menambah jumlah senjata nuklir dan menghambat agenda global perlucutan senjata nuklir. Alasan terakhir adalah adanya komponen radar di dalam sistem ini. Bagi Tiongkok, keberadaan radar di dalam THAAD dengan jarak lacak yang mampu menjangkau wilayahnya adalah suatu fitur yang tidak diperlukan Korea Selatan untuk mempertahankan dirinya.²⁷ Tiongkok mengkhawatirkan bahwa radar tersebut akan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, sebagai negara pemilik induk dari sistem tersebut untuk melacak misil yang mereka miliki dan akhirnya mampu memprediksi strategi pertahanan dan keamanan Tiongkok.²⁸ Hal yang paling Tiongkok kritisi sesungguhnya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam operasional sistem tersebut. Tiongkok melihat bahwa ditematkannya sistem THAAD tersebut akan menguatkan pengaruh Amerika Serikat terhadap Korea Selatan sekaligus memberikan Amerika Serikat kesempatan meningkatkan sistem pertahanan dan keamanannya di Kawasan Asia, yang tentu saja akan menjadi ancaman terhadap upaya pencapaian kepentingan Tiongkok untuk menjadi *regional power* tunggal.

²⁶ Ethan Meick, dan Nargiza Salidjanova, "China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and Implications," *U.S.-China Economic and Security Review Commission*, Juli (2017): hlm. 4-6

²⁷ Jagananth Sankaran & Bryan L. Fearey, "Missile Defense and Strategic Stability: Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea," *Contemporary Security Policy* 38, No.1 (2017): hlm. 9-10

²⁸ Heung-Kyu, Kim, "The International Politics of THAAD and the Direction of South Korea's Diplomacy," *Institute for Far Eastern Studies Issues and Analysis*, No.40 (2016) : hlm.3

Bersamaan dengan pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan, Tiongkok juga mengambil beberapa tindakan yang menunjukkan ketidaksetujuannya tersebut. Tindakan pertama adalah pembatalan berbagai kunjungan bilateral seperti penangguhan pertemuan tingkat tinggi pertahanan bilateral.²⁹ Tindakan kedua adalah memberikan tekanan militer dengan melakukan latihan penerbangan pesawat tempur yang melewati Zona Perbatasan Pertahanan Udara Korea Selatan.³⁰ Tindakan selanjutnya, Tiongkok menerapkan hambatan pada sektor pariwisata dengan memberikan instruksi kepada biro perjalanan di Tiongkok untuk tidak lagi menyediakan jasa perjalanan ke Korea Selatan yang menyebabkan jatuhnya angka kunjungan turis dari Tiongkok sebanyak 40%.³¹ Tindakan terakhir adalah pemberian hambatan di bidang perdagangan seperti mempersulit proses perizinan masuk kosmetik Korea Selatan, melarang pengadaan konser dan pertunjukan artis asal Korea Selatan di Tiongkok, memperlambat sertifikasi lulus uji baterai produksi Korea Selatan yang akan digunakan oleh pabrik-pabrik perakitan mobil Tiongkok, dan lain-lain.³² Seluruh tekanan yang diberikan Tiongkok tersebut memberikan kerugian yang cukup besar bagi Korea Selatan.

Melalui tindakan-tindakan tersebut, Tiongkok kemudian berusaha untuk menunjukkan kerugian yang didapatkan Korea Selatan jika hubungan bilateral kedua

²⁹ Michael Swaine, hlm.2

³⁰ Sarah Kim, dan Lee Chul-jae, "Chinese Plances Penetrate Korea's ADIZ," *JoongAng Daily*, 11 Januari, 2017, <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3028512> (diakses 21 April, 2018)

³¹ Joseph Jacobelli, "Disruptions Negatively Affecting Asian Companies," *Bloomberg Reports*, Maret, (2017): hlm.11

³² George A. Hutchinson, "China's Uneven Response to THAAD and it's Coercive Strategy Aimed at the ROK: Implications for the U.S.-ROK Alliance," *International Journal of Korean Studies* XX, No.2 (2016): hlm.14-15

negara tidak dijaga. Tiongkok berusaha mempengaruhi keputusan Korea Selatan untuk mempertimbangkan suara dan pandangannya atas penempatan sistem THAAD. Dengan demikian, hambatan dan tekanan yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan tersebut merupakan respon yang dikeluarkan Tiongkok sebagai strategi untuk mencegah adanya hambatan pencapaian kepentingannya untuk menjadi *regional power* tunggal di Asia.

1.2 Rumusan Masalah

Tiongkok muncul sebagai kekuatan baru yang mendominasi di Kawasan Asia melalui perkembangan pesat yang ditunjukkannya dalam berbagai sektor. Dalam upayanya mencapai posisi sebagai *regional power* tunggal di Asia, Tiongkok sangat mempertimbangkan keberadaan Amerika Serikat yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai negara di dalam kawasan. Untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat tersebut Tiongkok berusaha mendekati diri dengan berbagai negara di Kawasan Asia dan menarik negara-negara tersebut dari pihak Amerika Serikat, yang salah satunya adalah Korea Selatan. Tiongkok berhasil melakukan intensifikasi hubungan bilateral dengan Korea Selatan, akan tetapi hubungan harmonis kedua negara ini tidak berlanjut akibat keputusan Korea Selatan untuk menempatkan sistem pertahanan anti misil, yaitu THAAD, sebagai respon dari meningkatnya ancaman senjata nuklir Korea Utara.

Tiongkok tidak menyetujui keputusan Korea Selatan dan menolak penempatan sistem ini karena pembangunannya yang dilaksanakan bersama Amerika Serikat akan memperkuat ikatan aliansi kedua negara tersebut, yang artinya akan

membahayakan kepentingan Tiongkok untuk mendominasi Kawasan Asia. Penolakan ini Tiongkok tunjukkan dengan perenggangan hubungan diplomatik, pemberian tekanan militer, serta tekanan disektor perdagangan dan pariwisata pada Korea Selatan. Tekanan-tekanan yang diberikan Tiongkok tersebut merupakan upaya untuk mempengaruhi Korea Selatan membatalkan penempatan sistem THAAD, sehingga menarik untuk menganalisis strategi apa yang digunakan oleh Tiongkok dalam merespon ancaman pencapaian kepentingannya tersebut.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa strategi yang digunakan Tiongkok dalam merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan?

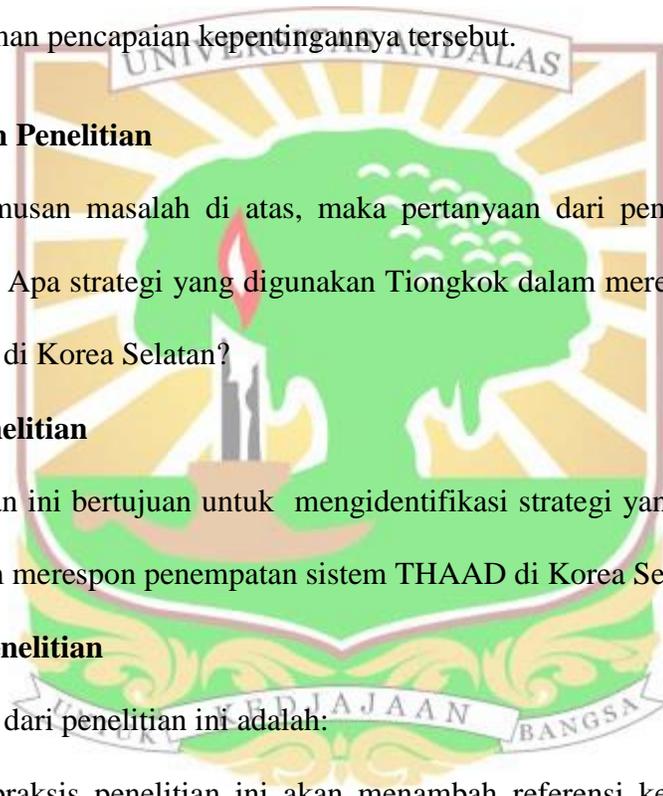
1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Tiongkok dalam merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praksis penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan terkait kajian strategis Tiongkok.
2. Secara teoritis penelitian ini akan menjadi model yang mendukung konsep *regional power* dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.



1.6 Kajian Pustaka

Dalam proses menganalisis masalah dan mencari jawaban masalah, penelitian ini bersandar kepada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan menjadi bahan acuan. Selain itu, literatur dan penelitian ini akan menunjukkan perbedaan hasil temuan yang sudah ada dengan temuan yang berusaha dijelaskan dalam penelitian ini. Literatur pertama yang menjadi acuan adalah tulisan dengan judul *THAAD: What It Can Do and Can't Do*.³³ Tulisan ini merupakan karya Michael Elleman dan Michael J. Zagurek, Jr. Yang dipublikasikan melalui website *38 North*, yang merupakan website resmi *think tank* kerjasama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang membahas mengenai analisis isu-isu terkait Korea Utara. Di dalam tulisannya, Zagurek dan Elleman menjelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana sistem THAAD berfungsi dalam perlingkungannya atas nuklir Korea Utara. Tulisan ini juga membahas mengenai hubungan THAAD di Korea Selatan dengan sistem anti misil Amerika Serikat lainnya. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa sistem THAAD merupakan pilihan rasional dari Korea Selatan untuk mempertahankan diri meskipun memang harus mempertimbangkan kerugian atas penolakan Tiongkok. Hal yang tidak ada didalam tulisan ini adalah tidak dipertimbangkannya dampak keberadaan THAAD terhadap upaya Tiongkok mencapai posisi sebagai *regional power*.

Selanjutnya, penelitian ini merujuk pada tulisan George A. Hutchinson di dalam *International Journal of Korean Studies* pada tahun 2016 yang berjudul *China's Uneven Response to THAAD and it's Coercive Strategy Aimed at the ROK:*

³³ Michael Elleman dan Michael J. Zagurek, Jr., "THAAD: What It Can and Can't Do," *38 North Special Report*, (2016): hlm. 1-11, <http://38north.org/wp-content/uploads/2016/03/THAAD-031016-Michael-Elleman-and-Michael-Zagurek.pdf> (diakses 30 September, 2016)

*Implications for the U.S.-ROK Alliance.*³⁴ Tulisan ini menjelaskan mengenai ancaman Korea Utara yang semakin meningkat sehingga Korea Selatan demi keamanan negaranya harus mengambil keputusan penempatan sistem THAAD. Sikap Tiongkok yang tidak menyetujui penempatan sistem tersebut, di dalam tulisan ini dinilai merupakan wujud dari upayanya membendung penguatan kembali aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, karena Tiongkok telah menganggap Korea Selatan sebagai negara mitra penting yang akan mendukungnya di kawasan Asia. Tulisan ini sudah memunculkan pandangan Tiongkok terhadap Korea Selatan, yaitu sebagai aliansi Amerika Serikat yang akan membantunya menahan penyebaran pengaruh Tiongkok, yang berbeda dengan penelitian ini adalah tidak dibahasnya posisi penting Korea Selatan sebagai negara yang patut ditarik menjadi pendukung dalam upaya Tiongkok menjadi *regional power*.

Tulisan selanjutnya yang menjadi acuan merupakan sebuah buku berjudul *Chinese Perspective Towards Korean Peninsula: In the Aftermath of North Korea's Fourth Nuclear Test.*³⁵ Di dalam buku ini dijelaskan mengenai Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping yang memiliki visi global untuk menjadi salah satu pemain signifikan di perpolitikan internasional. Adanya visi global Tiongkok menjadikan hubungan dengan Korea Utara dilihat tidak lagi relevan dan hanya dipertahankan atas dasar sejarah. Sebaliknya, Tiongkok harus mulai mendekat pada Korea Selatan untuk menggantikan Korea Utara sebagai partner strategis. Lebih jauh lagi tulisan ini juga menyebutkan bahwa penting bagi Tiongkok untuk mengikat Korea Selatan sebagai

³⁴ George A. Hutchinson, hlm. 1-29

³⁵ Yu Tiejun, Ren Yuanzhe, dan Wang Junsheng, *Chinese Perspectives Towards the Korean Peninsula* (Washington: Stimson, 2016)

aliansi Amerika Serikat agar dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik. Tulisan ini sudah memunculkan perebutan pengaruh antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Timur, terutama terhadap Korea Selatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah belum munculnya isu penempatan sistem THAAD oleh Korea Selatan.

Literatur selanjutnya yang juga menjadi acuan adalah buku dari Niall Duggan, dkk yang berjudul *Interpreting China as a Regional and Global Power: Nationalism and Historical Consciousness in World Politics*.³⁶ Di dalam buku ini Niall Duggan, dkk mengelaborasi kebijakan luar negeri Tiongkok, *Chinese Dream*, dimana Tiongkok menjadi negara yang memimpin di kawasan Asia. Buku ini membahas secara rinci mengenai sejarah Tiongkok sebagai negara yang menjadi kekuatan terbesar di Asia sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negerinya, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai posisi tersebut dilakukan dengan mendekati diri pada negara-negara disekitarnya seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, negara-negara kawasan Asia Selatan, dan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, buku ini juga membahas upaya Tiongkok untuk aktif di level internasional melalui partisipasi dalam forum-forum global, dan hubungan Tiongkok dengan Uni Eropa. Hal yang belum muncul dari tulisan ini adalah belum munculnya isu THAAD yang mempengaruhi hubungan Tiongkok dan Korea Selatan.

³⁶ Niall Duggan, et.al, *Interpreting China as a Regional and Global Power: Nationalism and Historical Consciousness in World Politics* (New York: Palgrave Macmillan, 2014)

Literatur terakhir adalah tulisan dari Adam P. Liff yang berjudul *China and the US Alliance System*.³⁷ Tulisan ini mengemukakan bahwa Tiongkok tidak menyetujui keberadaan jaringan aliansi yang dibentuk Amerika Serikat di Asia. Tiongkok terus menyuarakan pendapatnya bahwa sistem aliansi tersebut harus dieliminasi, karena sistem aliansi tersebut merupakan representasi mentalitas perang dingin. Selain itu, Tiongkok yang sedang berusaha menyebarkan pengaruhnya memandang jaringan aliansi tersebut sebagai alat yang digunakan Amerika Serikat untuk membendung usahanya tersebut. Lebih jauh lagi, bersamaan dengan naiknya Xi Jinping, Tiongkok mulai mempromosikan konsep *Asian Security* dimana Tiongkok mengarahkan negara-negara di Asia untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di dalam kawasan tanpa menarik pihak dari luar. Tulisan Liff berbeda dengan penelitian ini karena tidak membahas penempatan sistem THAAD, maupun upaya Tiongkok menarik negara-negara mitra di kawasan Asia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Regional Power Strategy

Regional power merupakan konsep di dalam ilmu hubungan internasional yang berkembang seiring dengan semakin banyak munculnya negara-negara yang mampu menjadi kekuatan baru di kawasan-kawasan spesifik. Negara-negara *regional power* ini memiliki posisi yang signifikan karena mampu membentuk tatanan kawasan serta mempengaruhi dinamika interaksi yang terjadi di dalamnya. Untuk

³⁷ Adam P. Liff, "China and the US Alliance System," *The China Quarterly*, (2017): hlm.1-29

dapat mengidentifikasi negara yang merupakan *regional power* di suatu kawasan, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:³⁸

- a. Merupakan negara yang secara geografis merupakan bagian dari kawasan spesifik
- b. Merupakan negara yang memiliki akumulasi *power* terbesar diantara seluruh negara anggota kawasannya. Terdapat dua jenis sumber *power* yang dapat dimiliki oleh negara, yaitu *power* materiel dan *power* ideasional. Dimana *power* materiel berfokus pada sumber yang dapat dihitung seperti kekuatan militer, yang kemudian didukung dengan kekuatan ekonomi dan demografi, sementara *power* ideasional berfokus pada sumber seperti budaya, norma, nilai, dan reputasi baik.³⁹
- c. Merupakan negara yang mampu menggunakan pengaruh yang dimilikinya dalam mengarahkan dinamika kawasan.

Berdasarkan kriteria diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *regional power* merupakan negara yang mendominasi dikawasannya berada.

Kriteria diatas sesuai dengan tulisan Lemke, yang menganalisis posisi *regional power* dengan menggunakan perspektif realisme struktural. Menurut Lemke, hierarki dari distribusi *power* tidak hanya terjadi di level internasional namun juga di level kawasan. Sebuah kawasan memiliki distribusi *power*nya sendiri, dan negara yang menduduki posisi teratas adalah negara dengan *power* terbesar, yaitu *regional power*. Negara yang menjadi *regional power* ini kemudian mendapatkan posisi

³⁸ Sandra Destradi, "Regional Power and Their Strategies: *Empire*, Hegemony, and Leadership," *Review of International Studies* 36, No.4, (2010): hlm.905

³⁹ Daniel Fledes, "Conceptualising Regional Power in International Relations: Lessons from the South African Case," *GIGA Working Papers*, No.53, (2007):hlm. 13-14

istimewa karena mampu membentuk kawasannya agar menjadi sebuah kawasan yang mendukung untuk pencapaian kepentingan nasionalnya.⁴⁰

Di dalam praktik untuk membentuk kawasan yang mendukung kepentingan nasionalnya, *regional power* memiliki beberapa pilihan strategi kebijakan luar negeri dalam berinteraksi dengan negara-negara di dalam kawasannya, yaitu negara-negara subordinat. Destradi di dalam tulisannya mengelaborasi enam tipe strategi yang dapat diterapkan oleh *regional power*. Terdapat tujuh indikator yang akan digunakan untuk mengidentifikasi jenis strategi yang digunakan, yaitu:⁴¹

- a. kepentingan yang ingin dicapai (*goals pursued*), terdapat tiga jenis kepentingan yang akan dicapai yaitu: (1) pembentukan tatanan yang berdasarkan dominasi militer; (2) tatanan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional; (3) atau tatanan yang mendukung pencapaian kepentingan kawasan,
- b. instrumen yang digunakan dalam pencapaian kepentingan (*ends means*), terdapat enam jenis alat atau media yang dapat digunakan yaitu: (1) pemberian tekanan militer berbasis kepentingan nasional; (2) pemberian sanksi, ancaman, maupun tekanan politis berbasis kepentingan nasional; (3) pemberian keuntungan-keuntungan materiel berbasis kepentingan nasional; (4) persuasi atau bujukan normatif berbasis kepentingan nasional; (5) persuasi atau bujukan normatif berbasis kepentingan kawasan; (6) dan penerimaan bersama bahwa kawasan membutuhkan peran pengarah atau manajer,

⁴⁰ Douglas Lemke, *Regions of War and Peace*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm: 49-50

⁴¹ Sandra Destradi, hlm.909-925

- c. kooperatif atau tidaknya citra yang ditunjukkan di dalam pencapaian kepentingan (*self-representation*), terdapat dua jenis citra yang ditunjukkan yaitu agresif yang ditandai dengan penggunaan kekuatan militer secara langsung, dan kooperatif yang tidak menggunakan kekuatan militer secara langsung atau tidak menggunakan kekuatan militer sama sekali,
- d. tingkat kesenjangan antara citra atau komitmen yang ditunjukkan untuk mencapai kepentingan bersama kawasan dengan sikap nyata yang diambil (*discrepancy between self-representation and actual behavior*), terdapat tiga tingkat kesenjangan yaitu: (1) tinggi, dimana citra yang ditunjukkan sangat berbeda dengan sikap nyata yang diambil; (2) menengah, dimana komitmen dan citra yang ditunjukkan cukup sesuai; (3) rendah, dimana komitmen dan citra yang ditunjukkan sangat sesuai dengan sikap nyata yang diambil,
- e. strategi respon dari negara subordinat (*subordinate states strategies*), terdapat enam jenis strategi respon yang dapat muncul pasca pemberlakuan strategi oleh *regional power* untuk mewujudkan kepentingannya, yaitu: (1) resistensi, yaitu menolak untuk mematuhi; (2) subordinasi, yaitu mematuhi secara terpaksa karena *power* yang terlalu lemah; (3) mematuhi didasari atas perhitungan rasional keuntungan yang akan didapatkan; (4) mematuhi didasari atas berhasilnya penyeragaman norma dan pemikiran dengan *regional power*; (5) mematuhi secara sukarela; (6) dan menginisiasi dorongan terhadap peran *regional power*,
- f. ada atau tidaknya perubahan normatif pada negara subordinat (*change on subordinate states normative orientation due to dominant state policy*), yaitu ada

atau tidaknya adopsi dari norma atau nilai yang ingin ditransfer oleh *regional power* kepada negara subordinat,

- g. tingkat legitimasi yang dimiliki *regional power* di dalam pencapaian kepentingan tersebut (*legitimation*), yaitu ada atau tidaknya internalisasi atau pengadopsian norma yang disebarkan oleh *regional power* pasca negara subordinat memberikan strategi respon. Terdapat empat jenis legitimasi yaitu: (1) *no legitimation*, yaitu tidak adanya internalisasi norma sama sekali karena tatanan yang dibangun berbasis penggunaan kekuatan militer dan ancaman; (2) *pseudo legitimation*, yaitu *regional power* berusaha menyebarkan dan mempromosikan norma yang diinginkannya namun hanya akan diinternalisasi oleh negara subordinat jika memberikan keuntungan berdasarkan perhitungan rasional; (3) *partial legitimation*, *regional power* berusaha menyebarkan dan mempromosikan norma yang diinginkannya, internalisasi norma akan terjadi dalam derajat tertentu dan memudahkan *regional power* untuk mempengaruhi negara subordinat namun negara subordinat masih melakukan perhitungan rasional saat mempertimbangkan untuk patuh atau tidak pada *regional power*; (4) dan *legitimation*, yaitu *regional power* berusaha menyebarkan dan mempromosikan norma yang diinginkannya yang kemudian akan diinternalisasi oleh negara subordinat sehingga kepatuhan negara subordinat tidak didasari pada perhitungan rasional namun pada kesamaan norma dan nilai.

Berdasarkan tujuh indikator tersebut terdapat enam jenis strategi *regional power*, yaitu:

a. *Empire*

Tipe ini merupakan tipe *regional power* yang bertumpu pada kepemilikan *power* materiel, yaitu militer dan pertahanan, sebagai basis untuk mendominasi kawasan.⁴² Tipe *empire* dalam praktiknya merupakan *regional power* yang berusaha mewujudkan kepentingan nasionalnya secara melalui penggunaan ancaman militer, maupun intervensi militer secara unilateral. Strategi tipe ini banyak dipraktikkan pada masa kerajaan, sebelum adanya sistem negara bangsa, dimana suatu kerajaan dapat mendominasi kerajaan-kerajaan lain disekitarnya dengan penyerangan langsung untuk kemudian menganeksasi kerajaan tersebut. Dengan model dominasi ini maka tipe *empire* merupakan tipe *regional power* yang dipandang oleh negara satu kawasannya sebagai negara yang agresif yang cenderung memberikan ancaman dan paksaan. Hal ini kemudian memberikan citra buruk sebagai negara yang agresif dan mengancam, namun tidak terdapat perbedaan antara citra yang ditunjukkan dengan sikap nyata yang diambil. Sikap agresif memicu dua kemungkinan respon dari negara-negara subordinat *regional power*, yaitu paksaan yang diberikan akan dituruti oleh negara yang *powernya* lemah dan ditolak oleh negara yang memiliki cukup *power* untuk mengimbangi *regional power*. Maka, ciri-ciri terakhir dari *empire* adalah tipe *regional power* ini tidak memiliki legitimasi atas negara subordinatnya karena kemampuan mengarahkan kawasan hanya berdasar pada pemberian ancaman, bukan melalui adanya penerimaan atas keberadaan *regional power* dan menginternalisasi norma yang ingin ditransfernya.

⁴² Ibid, hlm. 909-912

b. *Hegemony*

Hegemony merupakan tipe *regional power* yang secara umum dalam kebijakan luar negerinya menggunakan *power* materiel dan *power* ideasional secara bersamaan, karena dominasi atas militer dan ekonomi tetap harus diiringi penyebaran nilai-nilai kepada negara-negara subordinat agar negara *regional power* dapat dengan mudah mendapatkan konsensus atas tindakan-tindakannya.⁴³ Di dalam tujuan terhadap kawasannya *hegemony* tetap berorientasi pada upaya pencapaian kepentingan nasional, namun di dalam praktiknya menggunakan strategi yang lebih halus dibandingkan *empire*. Strategi tersebut digunakan untuk menyamarkan maksud pencapaian kepentingan nasional, melalui pernyataan publik yang menunjukkan bahwa *hegemony* hanya ingin memperjuangkan kepentingan bersama kawasan. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kesan publik yang ditunjukkan *hegemony* dengan sikapnya yang menerapkan kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Di dalam praktiknya terdapat 3 jenis strategi spesifik yang dapat diterapkan oleh *hegemony*, yaitu:

1. *Hard Hegemony*

Hegemony jenis ini merupakan *hegemony* yang berusaha membentuk tatanan atau sistem kawasan dengan menggunakan dominasi yang dimilikinya terhadap negara-negara subordinat.⁴⁴ Di dalam pencapaiannya, digunakan tekanan dan paksaan seperti *empire*, namun yang membedakannya

⁴³ Ibid, hlm.912-918

⁴⁴ Ibid, hlm. 918-919

adalah pada strategi ini tidak ada penggunaan kekuatan militer secara langsung seperti intervensi maupun pemberian ancaman perang. Alat atau media yang digunakan untuk mencapai kepentingan di dalam strategi ini adalah dengan memberikan sanksi politik atau diplomatik (nota protes, penundaan atau pembatalan kunjungan kenegaraan, pembekuan hubungan diplomatik), ancaman eksklusi dari institusi maupun kerjasama kawasan, pemberian sanksi ekonomi (menutup akses masuk pasar, pengurangan dan pembatalan bantuan luar negeri, pembatalan kesepakatan perdagangan), ancaman non intervensi militer, restriksi kunjungan antar negara, sanksi finansial, maupun embargo senjata. Pemberian tekanan ini tentu memberikan kesenjangan yang tinggi dengan citra kooperatif sebagai negara yang ingin memperjuangkan kepentingan kawasan. Negara subordinat dari *hard hegemony* kemudian akan mengikuti keinginan *regional power* sebagai respon balik atas tekanan tersebut, hanya jika akibat dari ketidakpatuhan tersebut akan memberikannya kerugian. Karena persetujuan negara subordinat hanya berdasar pada perhitungan kerugian dan bukan penyamaan pandangan, norma yang berusaha *regional power* promosikan lewat strateginya tersebut kemudian tidak diinternalisasi, dan *regional power* hanya mendapatkan *pseudo-legitimation*.

2. *Intermediate Hegemony*

Intermediate hegemony juga menyamakan kepentingannya, namun ketidaksesuaian antara pernyataan dan sikapnya berada dalam tingkat pertengahan karena sebagian dari kepentingannya merupakan kepentingan yang juga ingin

dicapai negara-negara subordinat.⁴⁵ Strategi yang diterapkan adalah melalui pemberian keuntungan-keuntungan kepada negara subordinat seperti pemberian fasilitas perdagangan, asistensi ekonomi (pemberian hutang, bantuan pembangunan), dan pemberian asistensi militer. Melalui instrumen tersebut kemudian negara-negara subordinat akan melakukan perhitungan dan mengikuti arahan *hegemony* hanya jika negaranya diuntungkan. Perbedaan *intermediate hegemony* dengan *hard hegemony* adalah, ketiadaan paksaan dan tekanan menciptakan kesan yang lebih positif sehingga pada skala tertentu terjadi pertukaran norma dan nilai diantara *hegemony* dan negara subordinat yang mampu memberikannya *partial legitimation* di kawasan sebagai pemimpin.

3. *Soft Hegemony*

Soft hegemony merupakan *hegemony* yang berusaha mengarahkan tatanan kawasan melalui pembentukan kembali norma dan nilai negara-negara subordinat sesuai dengan tatanan normatif yang ingin dibentuknya.⁴⁶ Seiring dengan terbentuknya tatanan normatif tersebut maka negara subordinat akan mengadopsi norma yang disosialisasikan *regional power* dan kepentingan nasionalnya akan berubah kearah yang sama dengan negara *hegemony*. Karena kesamaan kepentingan yang sudah terbentuk tersebut maka ketidaksesuaian antara pernyataan dengan sikap *soft hegemony* berada dalam tingkat terendah. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tatanan normatif ini adalah persuasi ideologi dan

⁴⁵ Ibid, hlm.919-920

⁴⁶ Ibid, hlm.920-921

penyebaran pengetahuan secara transnasional melalui kontak antar masyarakat secara berkesinambungan dengan pertukaran budaya, pertukaran pelajar, kerjasama transnasional dalam isu tertentu, dan fasilitas saluran diplomatik lainnya. Negara subordinat yang berhasil dipengaruhi biasanya akan patuh dan memberikan legitimasi penuh.

c. *Leadership*

Leadership merupakan tipe *regional power* yang tidak berfokus pada pencapaian kepentingan nasionalnya, namun lebih kepada peran memimpin dan mengarahkan negara-negara subordinat untuk memfasilitasi dan merealisasikan kepentingan bersama.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut maka ketidaksesuaian antara pernyataan dan kesan publik, dengan sikap kebijakan yang diambil terbilang rendah. Di dalam praktiknya terdapat dua jenis strategi yang dapat digunakan oleh *leadership* yaitu:

1. *Leader-initiated*

Jenis ini merupakan tipe *leadership* yang diinisiasi oleh *regional power*. *Leadership* dalam hal ini akan berperan untuk mengajak negara-negara subordinat untuk secara bersama menemukan kesamaan kepentingan atau kepentingan kolektif.⁴⁸ Strategi yang diterapkan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan proses sosialisasi terhadap negara-negara subordinat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan ide, nilai, dan norma, yang kemudian akan

⁴⁷ Ibid, hlm.921-924

⁴⁸ Ibid, hlm.924

merubah negara subordinat menjadi negara *follower*. Dengan demikian, negara subordinat dengan sukarela mematuhi negara *regional power* dan memberikannya legitimasi penuh.

2. *Follower-initiated*

Jenis ini merupakan tipe *leadership* yang diinisiasi oleh negara-negara subordinat.⁴⁹ Kebutuhan akan adanya negara yang menjadi pemimpin ini muncul dalam kawasan yang sudah menyadari keberadaan kepentingan kolektifnya namun tidak memiliki pengaruh dalam praktiknya. Kepentingan kawasan yang memicu adanya kebutuhan ini adalah adanya hubungan transnasional yang erat antar negara-negara kawasan sehingga dibutuhkan aktor yang dapat mengisi posisi manajerial dalam mengatur hubungan transnasional tersebut atau timbulnya ancaman eksternal kepada kawasan yang membutuhkan peran negara yang mampu menyelesaikan krisis. Di dalam tipe ini, *regional power* tidak menerapkan strategi khusus dimana negara-negara subordinat tidak memerlukan internalisasi norma dikarenakan sudah menerima dan memberikan legitimasi terhadap posisi pemimpin *regional power*.

⁴⁹ Ibid, hlm.924-925

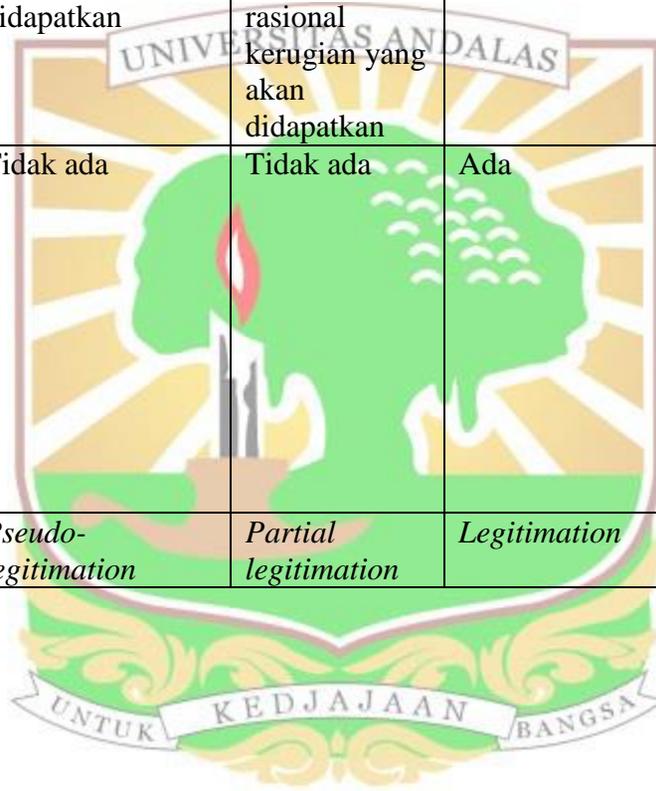
Tabel 1.1 Regional Power Strategy⁵⁰

	<i>Empire</i>	<i>Hegemony</i>			<i>Leadership</i>	
		<i>Hard</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Soft</i>	<i>Leader-initiated</i>	<i>Follower-initiated</i>
Kepentingan yang ingin di capai (<i>goals pursued</i>)	Pembentukan tatanan kawasan yang berbasis pada penggunaan ancaman atau intervensi militer	Pembentukan tatanan kawasan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional	Pembentukan tatanan kawasan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional	Pembentukan tatanan kawasan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional	Pembentukan tatanan yang mendukung kepentingan kawasan	Pembentukan tatanan kawasan yang mendukung pencapaian kepentingan kawasan
Instrumen yang digunakan (<i>ends means</i>)	Pemberian tekanan militer berbasis kepentingan nasional seperti intervensi militer dan ancaman perang	Pemberian tekanan non militer berbasis kepentingan nasional seperti tekanan politis/diplomatik, ancaman non intervensi militer, pemberian sanksi ekonomi, sanksi	Pemberian keuntungan-keuntungan materiel berbasis kepentingan nasional seperti asistensi ekonomi, asistensi	Persuasi atau bujukan normatif berbasis kepentingan nasional seperti pertukaran budaya, pertukaran pelajar, kerjasama	Persuasi atau bujukan normatif berbasis kepentingan kawasan melalui sosialisasi yang akan menyeragamkan norma dan nilai	Penerimaan bersama oleh negara-negara subordinat atas peran sebagai pengarah dan manajer

⁵⁰ Sumber: Sandra Destradi, *Regional Power and Their Strategies: Empire, Hegemony, and Leadership,* *Review of International Studies* 36, No.4, (2010), hlm.

		finansial, embargo senjata, maupun restriksi perjalanan	militer, maupun pemberian fasilitas perdagangan	transnasional, dan berbagai instrument lain yang mampu memfasilitasi penyebaran pengetahuan dan ideologi		
Citra yang ditunjukkan (<i>self- representation</i>)	Agresif, mengancam	Kooperatif	Kooperatif	Kooperatif	Kooperatif	Kooperatif
Tingkat kesenjangan antara citra/komitmen yang ditunjukkan dengan sikap nyata diambil (<i>discrepancy between self- representation and actual behavior</i>)	Rendah	Tinggi	Menengah	Rendah	Rendah	Rendah
Strategi respon dari negara subordinat (<i>subordinate</i>)	Resistensi atau subordinasi	Resistensi, atau jika negara subordinat patuh maka hal tersebut	Resistensi, atau jika negara subordinat	Kepatuhan yang didasari atas berhasilnya penyeragaman	Kepatuhan yang didasari atas kesukarelaan sebagai	Menginisiasi dorongan atau sokongan terhadap peran

<i>states strategies)</i>		didasari atas perhitungan rasional kerugian yang akan didapatkan	patuh maka hal tersebut didasari atas perhitungan rasional kerugian yang akan didapatkan	norma dan nilai	pengikut	yang harus diambil oleh <i>regional power</i>
Perubahan normatif pada negara subordinat (<i>change in subordinate states normative orientation due to dominant states's policy</i>)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada, karena sudah memiliki keseragaman norma sejak awal
Legitimasi (<i>legitimation</i>)	<i>No legitimation</i>	<i>Pseudo-legitimation</i>	<i>Partial legitimation</i>	<i>Legitimation</i>	<i>Legitimation</i>	<i>Legitimation</i>



Konsep *regional power strategy* ini akan dioperasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menempatkan Tiongkok sebagai negara *regional power* dan, Korea Selatan sebagai negara subordinat anggota kawasan. Konsep ini akan mengidentifikasi Tiongkok sebagai *regional power* dan Korea Selatan sebagai negara subordinat, penolakan terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan sebagai kepentingan Tiongkok, dan mengidentifikasi jenis strategi yang diterapkan dalam upaya mencapai kepentingannya sebagai *regional power*.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi perilaku atau sikap objek-objek penelitian sehingga dapat ditemukan makna dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bersandar pada analisis data-data non numerik baik dalam bentuk tekstual maupun lisan yang dilakukan dengan studi mendalam terhadap isu, fenomena, kawasan, negara, organisasi, maupun individu untuk memahami makna dan proses yang terjadi dalam politik internasional.⁵¹ Dengan menggunakan metode ini peneliti ingin menjelaskan strategi yang digunakan Tiongkok dalam merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Merujuk pada klasifikasi yang diberikan oleh Mochtar Masoed, penelitian deskriptif adalah kegiatan mendapatkan ilmu dengan berwujud pengumpulan fakta. Fakta-fakta yang terkait dengan isu

⁵¹ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations*, (California: SAGE Publications, 2015), hlm.78

penelitian dikumpulkan, digabungkan sehingga membentuk sebuah hubungan atau pola-pola yang memiliki makna, dan kemudian dilakukan generalisasi atas pola yang muncul.⁵² Menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penelitian akan mengumpulkan fakta-fakta terkait bagaimana Tiongkok merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan, menganalisis keterkaitan fakta-fakta tersebut hingga memunculkan pola spesifik, untuk selanjutnya pola ini akan digeneralisasi dengan bersandar pada kerangka konseptual sebagai parameter.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan mengambil batasan masalah strategi yang digunakan Tiongkok sebagai respon terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan dan mengambil batasan waktu penelitian dari tahun 2015, karena pada tahun tersebut pembicaraan mengenai penempatan THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sudah dimulai, hingga tahun 2017, untuk menjaga kebaruan data dan perkembangan isu.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan dan dideskripsikan.⁵³ Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisa disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.⁵⁴ Selain itu terdapat variabel *intervening* yang merupakan variabel

⁵² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, 1990) hlm.102-103

⁵³ Laura Roselle, dan Sharon Spray, *Research and Writing in International Relations* (London: Longman Pearson, 2008), hlm. 11-12

⁵⁴ Ibid

yang muncul diantara variabel dependen dan variabel independen yang berfungsi memfasilitasi atau menghambat proses saling mempengaruhi antara kedua variabel.⁵⁵

Sementara tingkat analisis merupakan entitas sosial spesifik yang menjadi target dalam penelitian⁵⁶ Tingkat analisis terdiri dari: (1) tingkat individu, yang menekankan pengaruh psikis, kepercayaan, persepsi, kepribadian, dari individu yang turut di dalam pengambilan kebijakan luar negeri seperti presiden maupun menteri luar negeri; (2) tingkat kelompok, yang menekankan analisis dari pengaruh pandangan kelompok tertentu seperti kelompok kepentingan, politbiro, departemen, birokrasi, dan lain-lainnya; (3) tingkat negara-bangsa, yang menekankan analisis pengaruh dinamika internal negara seperti budaya politik, opini publik, ideologi, sistem politik, dan lain-lainnya; (4) tingkat kelompok negara-negara atau regional, yang menekankan analisis pada interaksi beberapa negara yang membentuk kelompok atau pola seperti kawasan, aliansi, blok ideologi, dan lain-lainnya; (5) tingkat sistem internasional, yang menekankan analisis pada pola interaksi dari berbagai negara bangsa pada tingkat internasional seperti keberadaan norma dan hukum internasional, pola aliansi militer, pola perdagangan internasional, rezim internasional, dan lain-lainnya.⁵⁷ Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel dependen di dalam penelitian ini adalah strategi Tiongkok, variabel independen adalah penempatan sistem THAAD di Korea Selatan, variabel *interveningnya* adalah

⁵⁵ Paul R. Viotti, dan Mark V, Kauppi, *International Relations and World Politics Fifth Edition* (New Jersey: Pearson, 2013), hlm.26

⁵⁶ James Lee Ray, "Integrating Levels of Analysis in World Politics," *Journal of Theoretical Politics* 13, No.4 (2001): hlm. 356

⁵⁷ Mohtar Mas'ood, hlm.46-47

aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan, dan dalam tingkat analisis sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa penelitian dan literatur-literatur terdahulu, serta arsip resmi negara yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dimana teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang membatasi pengambilan data pada koleksi pustaka atau pada literatur maupun dokumen tertulis yang sudah ada, dan tidak menggunakan data lapangan.⁵⁸ Data-data di dalam penelitian ini akan diambil dari beberapa sumber seperti buku – buku, jurnal – jurnal ilmiah, surat kabar, berita, website resmi, maupun dokumen – dokumen resmi. Penelitian ini juga akan mengambil sumber yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui website resminya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan mengoperasikan konsep strategi *regional power* untuk menganalisis data dan menemukan strategi yang digunakan Tiongkok dalam merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Analisis data akan dimulai dengan mengelaborasi variabel independen, yaitu penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Selanjutnya, akan dielaborasi identifikasi Tiongkok sebagai *regional power* di kawasan Asia dan kepentingannya membentuk tatanan kawasan. Kemudian, akan dielaborasi sikap dan tindakan apa saja yang diambil Tiongkok dalam

⁵⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2

menanggapi penempatan sistem THAAD. Sikap Tiongkok ini kemudian akan diinterpretasikan dan digolongkan sesuai dengan salah satu dari enam kategori strategi yang ditawarkan oleh konsep, yaitu *empire*, *hard hegemony*, *intermediate hegemony*, *soft hegemony*, *leadership leader-initiated*, dan *leadership follower-initiated*. Jenis strategi yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Tiongkok akan diambil sebagai kesimpulan dan dideskripsikan secara menyeluruh.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta - fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan diteliti.

BAB II Tiongkok sebagai *Regional Power* di Kawasan Asia

BAB ini akan menjelaskan posisi Tiongkok sebagai *regional power* melalui sejarah, akumulasi *power*, pengaruh terhadap dinamika kawasan, maupun kebijakan luar negeri yang diterapkan terhadap kawasan Asia.

BAB III Respon Tiongkok Terhadap Penempatan Sistem THAAD di Korea Selatan dan Keterkaitannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok

BAB ini akan menjelaskan mengenai kebijakan Korea Selatan terkait penempatan sistem THAAD, respon Tiongkok terhadap penempatan sistem tersebut,

dan kaitannya dengan upaya Amerika Serikat membendung pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia.

BAB IV *Hard Hegemony* sebagai Strategi Tiongkok dalam Merespon Penempatan Sistem THAAD di Korea Selatan

BAB ini akan mendeskripsikan strategi yang digunakan Tiongkok untuk merespon penempatan sistem THAAD di Korea Selatan atas isu yang mengancam kepentingannya sebagai *regional power*.

BAB V Penutup

BAB ini menyediakan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

